



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 3, No. 1, Januari 2026
Hal 105-115

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023

Muh. Alfian Nur¹, Amran T. Naukoko², Jacline I. Sumual³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 29, 2025
Revised Desember 30, 2025
Accepted Januari 8, 2026

Kata Kunci:

Disparitas pembangunan,
Indeks Williamson,
Tipologi Klassen,
PDRB per kapita,
Sulawesi Selatan

Keywords:

*Development disparity,
Williamson Index,
Klassen Typology,
GRDP per capita,
South Sulawesi.*

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan wilayah menjadi salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan ekonomi, di mana terdapat perbedaan signifikan antar daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan meliputi Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan, Tipologi Klassen untuk mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, serta pengujian hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori menengah hingga tinggi. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat dan pendapatan per kapita yang tinggi, sementara daerah lainnya masih tertinggal. Tipologi Klassen mengelompokkan wilayah ke dalam empat kategori, yaitu daerah maju dan tumbuh cepat, daerah maju namun tertekan, daerah berkembang cepat namun belum maju, dan daerah relatif tertinggal. Selain itu, hipotesis Kuznets terbukti relevan dalam konteks Sulawesi Selatan, di mana ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan dan mulai menurun seiring meningkatnya pembangunan di beberapa wilayah.

ABSTRACT

Regional development inequality is one of the main problems in the economic development process, where there are significant differences between regions in terms of economic growth and per capita income. This study uses a descriptive-quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis methods used include the Williamson Index to measure inequality, the Klassen Typology to group regions based on growth rates and per capita income, and testing the Kuznets hypothesis on the inverted U-curve. The results of the study indicate that economic development inequality between districts/cities in South Sulawesi is included in the medium to high category. Some regions experience rapid growth and high per capita income, while other regions are still lagging behind. The Klassen Typology groups regions into four categories, namely developed and rapidly growing regions, developed but depressed regions, rapidly developing but not yet developed regions, and relatively lagging regions. In addition, the Kuznets hypothesis is proven to be relevant in the context of South Sulawesi, where inequality tends to increase in the early stages of growth and begins to decline as development increases in several regions.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Muh. Alfian Nur
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado,
Manado, Indonesia
Email: alfianganteng2612@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur sosial, pola pikir yang telah terbentuk, serta lembaga-lembaga nasional, ditambah dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan, dan penghapusan kemiskinan absolut [5]. Indikator dari pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan adil. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola sumber daya yang tersedia dan membangun pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut [1].

Pertumbuhan ekonomi terhalang oleh adanya disparitas atau ketimpangan dalam pembangunan yang tidak seimbang. Disparitas wilayah merupakan fenomena dalam pembangunan yang menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Akibatnya terdapat daerah yang cenderung berkembang dan daerah yang cukup tertinggal[4]. Sjafrizal (2018) menyatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi ketidakmerataan antar wilayah adalah perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, distribusi dana pembangunan antar wilayah baik dari pemerintah maupun swasta, konsentrasi aktivitas ekonomi di suatu wilayah, serta pergerakan barang dan jasa. Tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah.

Pembangunan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai proses yang meningkatkan GNP per kapita (Gross National Product) atau pendapatan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, pembangunan ekonomi memiliki tiga karakteristik penting, yaitu: (1) suatu proses yang menunjukkan adanya perubahan yang berkesinambungan, (2) upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, (3) peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Ekonomi pembangunan diartikan sebagai peningkatan dalam pendapatan per kapita, dan laju pembangunan ekonomi diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional serta PDRB untuk tingkat wilayah atau regional[6].

Pembangunan bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata [1]. Dalam jangka waktu yang relatif lama, pembangunan nasional telah menghasilkan kemajuan yang signifikan, namun juga mewariskan sejumlah masalah mendesak yang perlu diatasi, termasuk masih adanya ketimpangan atau disparitas antar wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Karena itu, setiap wilayah selalu menetapkan sasaran pertumbuhan yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya.

Pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan distribusi yang merata akan memperbesar kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat, sedangkan distribusi ekonomi tanpa ada

pertumbuhan akan berujung pada peningkatan kemiskinan di suatu wilayah [7]. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa pemerataan akan menyebabkan ketidakmerataan wilayah. Ketimpangan wilayah itu tampak dengan adanya kawasan yang berkembang dan kawasan yang tertinggal atau kurang berkembang. Ini disebabkan oleh ketidakperhatian terhadap apakah pertumbuhan tersebut melebihi atau kurang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan populasi atau perubahan struktur ekonomi.

Pembangunan di tingkat daerah, selain mendorong PDRB dan pertumbuhan ekonomi, juga harus memprioritaskan pembangunan manusia. Santika (2014) menyatakan bahwa tingkat pembangunan manusia dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketidakseimbangan pembangunan wilayah adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan keadaan antar wilayah yang berkembang dan wilayah yang tertinggal. Perbedaan ini terjadi karena daerah yang kurang berkembang belum dapat mengoptimalkan potensi di wilayah tersebut serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga menciptakan kesenjangan antara daerah maju dan terbelakang. Dampak dari perbedaan ini adalah kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan tentunya akan bervariasi. Di satu sisi terdapat daerah yang pembangunannya meningkat secara signifikan, sementara di sisi lain ada daerah yang pembangunan tetap tidak bergerak dari suatu titik. Ketidakseimbangan pembangunan antar daerah akan memicu kemiskinan di suatu wilayah sebagai akibat dari pembangunan yang semakin terpusat dan meningkatnya proyek pembangunan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dengan tingkat pembangunan yang bervariasi antara satu daerah dan lainnya, disebabkan oleh adanya perbedaan potensi baik dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kualitas teknologi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di daerah yang unggul di bidang tertentu meningkat dibandingkan daerah lainnya, sehingga menciptakan tingkat ketimpangan antar daerah yang tinggi [10].

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat diukur melalui tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu tanda keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi ini bervariasi antara daerah yang berbeda. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai 6,92%, angka ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan di angka 5,02%.

Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Harga Konstan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara wilayah-wilayah di Provinsi ini. Terdapat kecenderungan peningkatan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa, meskipun dengan kecepatan yang bervariasi. Tetapi, terdapat pula wilayah yang mengalami peningkatan yang signifikan, seperti Kota Makassar yang mencatat peningkatan luar biasa dari tahun 2021 hingga 2023. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Kabupaten Sinjai menunjukkan pola yang kurang konsisten dengan variasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, Sulawesi Selatan menunjukkan kenaikan pada PDRB per Kapita selama periode yang diamati, dengan variasi yang mencolok antara daerah yang menekankan pentingnya analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi bagi warganya. Peningkatan kapasitas itu ditentukan atau memungkinkan melalui kemajuan dan penyesuaian teknologi, institusi (kelembagaan), serta ideologi

terhadap berbagai tuntutan situasi yang ada [5]. Kuznets mengemukakan bahwa di awal proses pertumbuhan ekonomi, ketimpangan umumnya meningkat, kemudian pada fase selanjutnya, ketimpangan akan berkurang, tetapi pada suatu saat, disparitas akan kembali meningkat dan akhirnya menurun lagi [5]. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan hasil atau keluaran masyarakat yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah faktor produksi dan penggunaannya dalam proses produksi komunitas. Sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dapat dilihat dari peningkatan ekonomi, komposisi ekonomi, serta pengurangan kesenjangan pendapatan di antara masyarakat, wilayah, dan sektor. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diimbangi dengan distribusi yang memadai. Jurang pembangunan dapat mengecil lagi saat daerah yang makmur semakin berkembang [9]

Data Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam jumlah penduduk di berbagai wilayah. Beberapa daerah, seperti Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan yang cukup stabil dalam jumlah penduduk selama periode tersebut. Namun, terdapat juga daerah-daerah yang mencatat lonjakan yang signifikan, seperti Kabupaten Bone yang mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup drastis dari tahun 2019 hingga 2023. Di sisi lain, Kota Makassar dan Kabupaten Wajo menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam jumlah penduduk, yang mungkin mencerminkan faktor-faktor seperti imigrasi atau kebijakan demografis yang berbeda di setiap daerah. Kesimpulannya, sementara Sulawesi Selatan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dalam jumlah penduduk selama periode yang diamati, variasi yang signifikan antara daerah menyoroti perlunya perencanaan yang cermat dalam menghadapi tantangan demografis dan sosial di masing-masing wilayah.

Ketimpangan seringkali muncul sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan upaya-upaya pembangunan tidak mempertimbangkan kondisi dan potensi di setiap daerah. Misalnya, di daerah-daerah di mana sebagian besar masyarakat bekerja di sektor agraris dan memiliki pendidikan yang rendah, pertumbuhan ekonomi mungkin tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Ketidakmerataan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, adalah isu serius yang membutuhkan penanganan yang cermat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat memicu krisis yang lebih rumit yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan manusia. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan isu kependudukan, seperti urbanisasi yang tidak teratur atau migrasi masif, serta mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Contohnya, ketidakmerataan ekonomi bisa memicu konflik politik dan ketegangan sosial, sementara ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya alam dapat membahayakan keberlangsungan lingkungan. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan juga memberikan dampak negatif secara makro terhadap proses dan hasil yang diharapkan oleh suatu daerah, menghalangi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, penanganan ketidaksetaraan pembangunan hendaknya menjadi fokus utama dalam usaha mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua strata masyarakat.

Pembangunan berlangsung hanya di satu lokasi dalam suatu negara. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi di negara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga menyebar ke wilayah-wilayah yang menyediakan sumber daya. Ini berpengaruh pada berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan penilaian Kuznet (seperti yang dikutip oleh Todaro & Smith, 2011), yang menyatakan bahwa di awal fase pembangunan, tingkat ketimpangan akan tinggi, namun kemudian cenderung meningkat. Hubungan ini dapat digambarkan dalam bentuk Kurva U terbalik.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Studi yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang mencoba menjelaskan penyelesaian masalah yang ada saat ini berdasarkan data yang tersedia. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah menyusun deskripsi, citra, atau representasi secara sistematis dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur indikator-indikator dari variabel penelitian, sehingga bisa didapatkan gambaran mengenai hubungan antarvariabel tersebut. Pemanfaatan penelitian deskriptif-kuantitatif menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu perlakuan di area tertentu sehubungan dengan hubungan sebab akibat berdasarkan observasi terhadap akibat yang terjadi. Selanjutnya, dengan pendekatan kuantitatif, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dalam memahami dan mendeskripsikan realitas rasional sebagai realitas subjek dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, terutama sektor-sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023

2.2 Metode Analisis Data

2.2.1 Analisis Klassen Tipology

Analisis Tipologi Klassen merupakan metode yang digunakan untuk memahami gambaran mengenai pola serta struktur pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah [8]. Berdasarkan karakteristik fundamental yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang telah diuraikan sebelumnya, suatu daerah dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pola serta struktur pertumbuhan ekonominya

2.2.2 Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson memanfaatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya terang karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Indeks Ketimpangan Williamson adalah analisis yang dipakai untuk memahami ketimpangan pembangunan yang terjadi di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi bisa dianalisis dengan cara sebagai berikut [2]:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

2.2.3 Teori Kuznets tentang Kurva U-terbalik

Simon Kuznets yang mengawali analisis pola pertumbuhan sejarah di negara-negara maju menyatakan bahwa pada fase awal selanjutnya, distribusi pendapatannya cenderung memburuk, tetapi pada fase berikutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Pengamatan ini umum dikenal sebagai konsep kurva "U-terbalik", karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan akan berkurang seiring dengan peningkatan PDRB per kapita pada tahap pembangunan berikutnya. Penurunan sementara dalam pertumbuhan PDRB per kapita sering kali menyebabkan ketidaksetaraan yang semakin tajam. Hipotesis Kuznets (kurva U terbalik) dapat dibuktikan dengan menghitung PDRB per kapita dan indeks ketimpangan. Grafik itu menggambarkan keterkaitan antara pertumbuhan PDRB dan indeks Entropi Theil sepanjang periode yang diamati. Kurva U-terbalik menunjukkan peningkatan kesenjangan distribusi pendapatan di fase awal pembangunan dan penurunan di fase-fase selanjutnya

2.2.4 Analisis Statistika Deskriptif

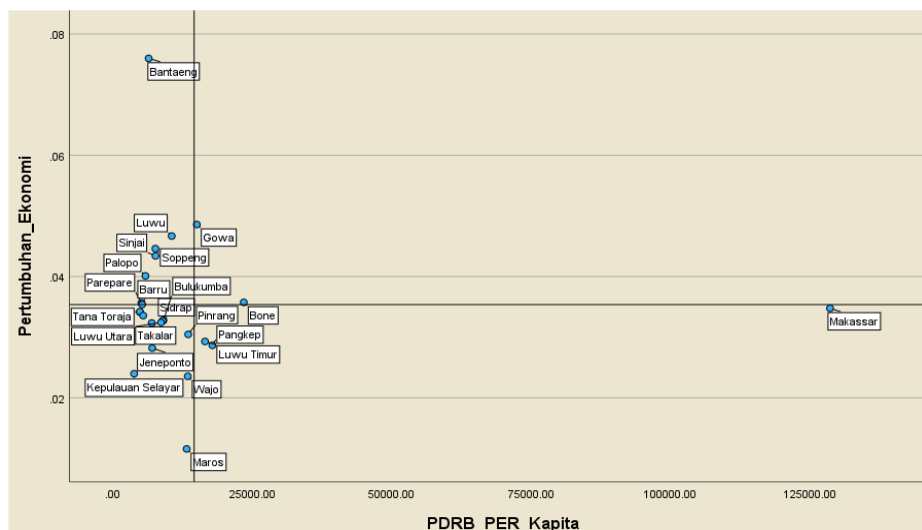
Penentuan metode analisis adalah serangkaian langkah yang terlibat dalam proses penelitian. Analisis data dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diujikan serta hipotesis. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau data melalui tabel, grafik, rata-rata, frekuensi, atau cara lainnya. Dalam statistik deskriptif, analisis dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, diagram, daftar frekuensi, ukuran tendensi pusat (mean, median, modus), ukuran penyebaran (rentang, deviasi standar, varians), dan sejenisnya [3].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisi Tipologi Klasen

Tabel 1. Hasil Analisis Tipologi Klasen

PDRB perkapita Laju Pertumbuhan	Ydi > yni (+)	ydi < yni (-)
Rdi > rmi (+)	(I) Daerah maju dan tumbuh cepat	(II) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju: Makassar
Rdi < rmi (-)	(III) Daerah maju tapi tertekan: Bantaeng, Gowa, Luwu, Soppeng, dan Bulukumba	(IV) Daerah relatif tertinggal: Barru, Bone, Enrekang, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Tana Toraja, Takalar, Wajo, dan Toraja Utara.



Gambar 1. Tipologi Klasen

Hasil ini memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Sulawesi Selatan. Kuadran I (Maju dan Cepat Tumbuh) Tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode penelitian, belum ada daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi sekaligus laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi. Kuadran II (Maju tetapi Tertekan) Wilayah yang masuk kategori ini adalah Kota Makassar. Kota ini

memiliki PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain, menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Makassar berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menggambarkan adanya gejala kejenuhan ekonomi, di mana daerah yang sudah maju cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Kuadran III (Berkembang Cepat) Wilayah yang masuk kategori ini meliputi Kabupaten Bantaeng, Gowa, Luwu, Soppeng, dan Bulukumba. Daerah-daerah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di atas rata-rata provinsi, namun tingkat PDRB per kapita masih rendah. Dengan demikian, wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan apabila mampu memaksimalkan sektor unggulan yang dimilikinya.

Kuadran IV (Relatif Tertinggal) Sebagian besar wilayah lain termasuk dalam kategori ini, yaitu Barru, Bone, Enrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Tana Toraja, Takalar, Wajo, dan Toraja Utara. Kabupaten/kota tersebut memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang juga rendah. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar daerah di Sulawesi Selatan masih menghadapi permasalahan struktural dalam pembangunan ekonomi, seperti keterbatasan investasi, rendahnya produktivitas, dan ketergantungan pada sektor primer.

3.2 Analisis Indeks Williamson

Tabel 2. hasil Indeks Williamson

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2019	0.73533596	Ketimpangan taraf tinggi
2020	0.772075603	Ketimpangan taraf tinggi
2021	0.753623371	Ketimpangan taraf tinggi
2022	0.763486532	Ketimpangan taraf tinggi
2023	0.780377549	Ketimpangan taraf tinggi

Data Indeks Williamson (WL) di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan ketimpangan taraf tinggi dari tahun 2019 hingga 2023. Ketimpangan taraf tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi karena sejumlah faktor struktural, spasial, dan ekonomi yang saling berkaitan, Makassar sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan terutama yang terpencil tertinggal secara pembangunan dan kesejahteraan. Wilayah seperti Luwu Utara, Toraja, dan Kepulauan Selayar memiliki akses infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, internet) yang terbatas, Ketimpangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperbesar kesenjangan antar wilayah. Sering kali, kebijakan pembangunan tidak cukup memperhatikan potensi dan kebutuhan spesifik daerah-daerah kecil. Akibatnya, pembangunan berjalan tidak merata dan hanya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan yang sudah mapan.

3.3 Hubungan Antara Indeks Williamson Dengan PDRB Per Kapita

Tabel 3. Hubungan Antara Indeks Williamson Dengan PDRB Per Kapita

Correlations			
		Indeks Williamson	PDRB Per Kapita
Indeks Williamson	Pearson Correlation	1	.812**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	24	24
PDRB Per Kapita	Pearson Correlation	.812**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	24	24

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan kuat secara statistik antara Indeks Williamson dan PDRB Per Kapita, dengan koefisien korelasi Pearson sebesar 0.812 dan signifikansi < 0.001 yang jauh lebih kecil dari 0.01. Ini berarti, ketika PDRB Per Kapita meningkat, Indeks Williamson yang mengukur ketimpangan juga meningkat secara signifikan.

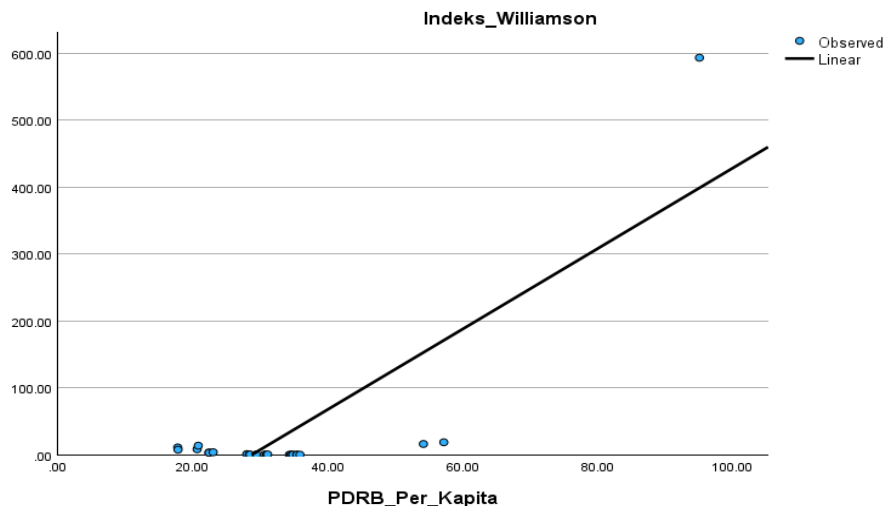
3.4 Hipotesis Kuznets “U-terbalik” di Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4. Hipotesis Kuznets “U-terbalik” di Provinsi Sulawesi Selatan

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.356	2.038		14.893	<.001
	Indeks Williamson	.110	.017	.812	6.534	<.001

Hubungan Angka PDRB Per Kapita dengan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hubungan **positif dan signifikan**, dengan nilai koefisien regresi sebesar **0.110**, nilai t sebesar **6.534**, dan nilai signifikansi **p < 0.001**. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada Indeks Williamson berpotensi meningkatkan PDRB Per Kapita sebesar 0.110 satuan. Nilai beta standar yang sama sebesar **0.812** menegaskan bahwa kekuatan pengaruh tetap tinggi. Secara statistik model Regresion Curve Estimation dapat diterima sehingga persamaan Regresion Curve Estimation adalah: $IW = 30,356 + , 0,110 \times 0,110$. Hal ini mencerminkan bahwa **wilayah dengan ketimpangan tinggi cenderung memiliki konsentrasi ekonomi yang lebih besar**, yang tercermin dalam tingginya PDRB Per Kapita. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan **teori kutub pertumbuhan (growth pole theory)** yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terfokus di wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan tertentu (seperti pusat kota atau daerah industri), dan tidak serta-merta menyebar ke wilayah lain. Akibatnya, terjadi peningkatan PDRB per kapita secara keseluruhan, namun juga terjadi kesenjangan antar wilayah.

Pembuktian kurva U-terbalik dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara Indeks Williamson dengan PDRB per kapita untuk itu digunakan Regresion Curve Estimation seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Hipotesis Kuznets “U-terbalik” di Provinsi Sulawesi Selatan

Di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data dan analisis grafik ini, Grafik menunjukkan hubungan linear positif antara PDRB Per Kapita dan Indeks Williamson . Artinya, semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi pula Indeks Williamson, yang berarti ketimpangan antarwilayah semakin besar. Terlihat ada satu titik data yang sangat tinggi (PDRB > 90 dan Indeks Williamson > 600), ini adalah outlier yang sangat memengaruhi garis tren (regresi). Hipotesis Kuznets tidak terbukti dalam grafik ini. Justru, grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar ketimpangan antar wilayah. Ini bisa berarti bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata, dan wilayah dengan PDRB tinggi masih mengalami konsentrasi pembangunan, bukan redistribusi.

3.5 Pembahasan Hasil

Tipologi Klassen ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan struktur ekonomi yang nyata di antara wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah yang berada di kuadran I umumnya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, baik karena keberadaan kota besar, aksesibilitas transportasi, atau konsentrasi investasi. Sebaliknya, daerah yang masuk kuadran IV memerlukan intervensi kebijakan melalui peningkatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta penguatan sektor unggulan lokal. Sementara itu, daerah di kuadran II dan III memiliki potensi berkembang lebih lanjut apabila difasilitasi dengan strategi pembangunan yang tepat, seperti insentif sektor produktif dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan demikian, hasil analisis Tipologi Klassen menjadi alat penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, karena menunjukkan peta ketimpangan ekonomi yang konkret dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson dari tahun 2019 hingga 2023, ditemukan bahwa nilai indeks Williamson berada di atas 0,5 untuk setiap tahun, yang berarti ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori tinggi. Nilai yang konsisten di atas 0,5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir tidak terdistribusi secara merata antar kabupaten/kota. Nilai Indeks Williamson yang tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah saja, seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros, yang memiliki sektor industri, jasa, dan infrastruktur yang lebih berkembang. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Tana Toraja mengalami kesenjangan dalam hal kontribusi terhadap PDRB provinsi dan belum mampu mengejar ketertinggalan. Perbedaan dalam akses pendidikan, sumber daya alam, transportasi, dan alokasi anggaran pembangunan menjadi penyebab utama ketimpangan ini. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bersifat inklusif, dan hanya dirasakan oleh wilayah yang telah memiliki basis ekonomi kuat. Daerah dengan infrastruktur yang terbatas dan ketergantungan tinggi pada sektor primer seperti pertanian cenderung tertinggal. Mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pembangunan yang merata. Ketimpangan yang tinggi antar daerah berpotensi menghambat integrasi ekonomi regional dan menimbulkan ketidaksetaraan sosial.

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang diwakili oleh PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil perhitungan korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Indeks Williamson dengan PDRB per kapita selama periode 2019 hingga 2023. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0,65$ dan nilai signifikansi $p < 0,05$, ini mengindikasikan bahwa ketika PDRB per kapita meningkat, ketimpangan (IW) juga cenderung meningkat. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, yang tercermin dari kenaikan PDRB per kapita, tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan antar wilayah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh daerah-daerah dengan ekonomi yang sudah maju, sehingga disparitas atau ketimpangan antar kabupaten/kota justru melebar. Hal ini sejalan dengan fenomena yang umum terjadi pada tahap awal pembangunan ekonomi, di mana konsentrasi sumber daya dan investasi mengarah ke wilayah tertentu yang sudah memiliki infrastruktur dan kapasitas ekonomi yang lebih baik, seperti Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Berdasarkan analisis korelasi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan belum berhasil menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Justru sebaliknya, pertumbuhan tersebut cenderung memperbesar disparitas ekonomi antar kabupaten/kota.

Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan ekonomi akan meningkat, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, ketimpangan tersebut akan menurun. Namun, hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita justru berkorelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan (nilai koefisien regresi positif, dengan signifikansi $p < 0,001$). Artinya, di Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama lima tahun terakhir belum mampu memperkecil ketimpangan antar daerah. Sebaliknya, wilayah dengan ekonomi lebih maju justru mengalami pertumbuhan yang lebih pesat, memperlebar kesenjangan dengan daerah tertinggal. Dengan demikian, hipotesis Kuznets tidak terbukti dalam konteks wilayah ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, pola serta struktur ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya perbedaan. Ada beberapa wilayah yang tergolong maju dan berkembang pesat, seperti Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sementara sebagian besar yang lain termasuk dalam kategori relatif tertinggal atau berkembang namun tertekan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum merata di seluruh wilayah, dan masih terfokus di daerah tertentu yang memiliki tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi.

Perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023 tergolong sedang hingga tinggi. Nilai indeks ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang signifikan antara daerah yang maju pesat dan wilayah yang masih tertinggal. Ini disebabkan oleh variasi dalam potensi sumber daya alam, jumlah populasi, infrastruktur, serta distribusi investasi di setiap daerah.

Keterkaitan antara Indeks Williamson dan PDRB Per Kapita di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bukti yang selaras dengan hipotesis Kuznets, yaitu bahwa pada fase awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan bertambah seiring dengan kenaikan PDRB per kapita. Namun, dalam periode berikutnya, terlihat adanya kecenderungan penurunan disparitas di sebagian wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Sulawesi Selatan mulai memperlihatkan arah konvergensi, meskipun belum sepenuhnya merata.

REFERENSI

- [1] Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Unti Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- [2] Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma.
- [3] Hendryadi, S. 2018. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Kencana.
- [4] Bakri, B., Syafrizal, S., & Aimon, H. 2015. Analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat dan kebijakan penanggulangnya. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4(7), 103017.
- [5] Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- [6] Sirojuzilam, S. 2008. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara dan Kaitannya dengan Perencanaan Wilayah* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- [7] Rubiarko, Sabda Imani. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011. *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Bisnis*. Universitas Brawijaya.
- [8] Aswandi, H., & Kuncoro, M. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(1).
- [9] Khusna, L. (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 1-20.
- [10] Fitriyah L dan Rachmawati L. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Surabaya: Kampus Ketintang UNESA.